

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK  
DI BAWAH UMUR**

(Analisis Yuridis Putusan No : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN.)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**FIRA CAHYA ISLAM Y**

**NIM. 105010107111028**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**MALANG  
2015**



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku

Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis No : 38/PID  
SUS/2013/PN.KD.MN. )

Penulisan Skripsi ini merupakan sebagian syarat untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum, dalam menyelesaikan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Syafa'at, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, SH., M.hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus sebagai Pembina Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana (HIMAKOPI), yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar mengarahkan, membimbing, memotivasi serta memberikan kritik dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ismail Navianto, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk mmberikan ide dan gagasan serta kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini



4. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping

Penulis yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar, mengarahkan, membimbing, memotivasi, serta memberikan kritik dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mendidik dan memberikan pelayanan yang baik selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

6. Bapak dan Ibu Tercinta, Zainal Arifin, S.T., dan Hari Cahyaningtias S.pd atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dukungan materiil dan moril serta doa dan restu yang diberikan kepada Penulis.

7. Adik tercinta Fidurroty Baidho, yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan luar biasa kepada Penulis.

8. Erwin Adiabakti, S.H yang selalu memberikan semangat, bantuan dan motivasi.

9. Sahabat Penulis Adhitya Yuda, Ashawy Sahavia Grandysta, , Husnul Farid, S.H, Muhammad Faridul qudsi dan Onky Dimas atas suka duka, kebersamaan, belajar bersama segala tentang kehidupan, dan khususnya dalam semangat berjuang bersama.

10. Pihak-pihak lain yang telah yang turut membantu selesainya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.





Penulis yang inskripsi ini sangat jauh dari sempurna, sehingga penulis berharap akan selalu dimasukkan dan kritik guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya pada kita semua dan mengampuni kesalahan yang kita perbuat. Amin.

Malang, April 2015

(Penulis)



## Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	ii
Daftar Isi.....	5
RINGKASAN .....	Error! Bookmark not defined.
SUMMARY.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN .....	Error! Bookmark not defined.
A. LATAR BELAKANG .....	Error! Bookmark not defined.
B. RUMUSAN MASALAH .....	Error! Bookmark not defined.
C. TUJUAN PENELITIAN .....	Error! Bookmark not defined.
D. MANFAAT PENELITIAN .....	Error! Bookmark not defined.
E. SITEMATIKA PENULISAN .....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
KAJIAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
b. Pengertian, Tugas, dan Kewenangan Hakim.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kajian Umum tentang Putusan Akhir .....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Putusan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Anak .....	Error! Bookmark not defined.
D. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan .....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN .....	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pendekatan Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
C. Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.



**HASIL DAN PEMBAHASAN**..... Error! Bookmark not defined.

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana  
Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor  
38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN..... Error! Bookmark not defined.

2. Dasar Pertimbangan Hakim..... Error! Bookmark not defined.

**Kesimpulan:**..... Error! Bookmark not defined.

**Hal-hal yang memberatkan:**..... Error! Bookmark not defined.

**Hal-hal yang meringankan:**..... Error! Bookmark not defined.

B. Kesesuaian Putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN dengan ketentuanError! Bookmark not defined.

**BAB V**..... Error! Bookmark not defined.

**PENUTUP**..... Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan..... Error! Bookmark not defined.

B. SARAN..... Error! Bookmark not defined.

**DAFTAR PUSTAKA**..... Error! Bookmark not defined.

**BUKU:**..... Error! Bookmark not defined.

Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung, 2006Error! Bookmark not defined.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010Error! Bookmark not defined.

Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012Error! Bookmark not defined.

Shaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007Error! Bookmark not defined.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, 1986Error! Bookmark not defined.

**PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN :**..... Error! Bookmark not defined.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Error! Bookmark not defined.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);..... Error! Bookmark not defined.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;Error! Bookmark not defined.

**PUTUSAN PENGADILAN:**..... Error! Bookmark not defined.

**JURNAL:**..... Error! Bookmark not defined.

**INTERNET:**..... Error! Bookmark not defined.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Anak adalah manusia sejak ligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jagakarena dalam dirinyamelekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di jungjung tinggi. Hak asasi anak merupakan anbagi dari hak asasi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnyadisebut dengan UUD 1945). Dari sisikehidupan berbangsadan bernegara, anak adalah masadepan bangsadan generasi penerus cita-cita bangsa, sehinggasetiap anakberhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipildan kebebasan.

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang bertujuan menanggulangi kejahatan yang terjadi. Menanggulangi kejahatan artinya mengendalikan kejahatan yang ada agar berbedadalam batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila mampu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadisehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah dipidana.<sup>1</sup>

Dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan penjatuhan putusan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnyadisebut dengan KUHP)

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 32.



menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan penyidikan ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu untuk menjelaskan dan menetapkan suatu peristiwa yang dapat dipidana. Setelah itu tahap penuntutan, menurut Pasal 1 Ayat 7 KUHP

menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan.

Masalah kejahatan asusila di negara kita terakomodasi dalam sistem perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP) yang meliputi kejahatan pornografi, persetubuhan, perzinahan dan perkosaan. Selain memerlukan kewaspadaan dari setiap elemen masyarakat karena kejahatan asusila dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut mempengaruhi perkembangan kesusilaan. Jika dahulu orang membicarakan tentang seks dianggap tabu, tetapi pada saat ini telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksologi. Pada beberapa majalah bahkan surat kabar harian, telah dibahas tentang seks yang dimuat pada rubrik tanya jawab atau rubrik seksologi. Perkembangan hak-hak asasi manusia telah menitik beratkan bahwa menikmati



seks merupakan hak (*right*) orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan di sebagian negara di dunia merupakan perbuatan yang wajar.

Dalam perkara pidana hakim juga bertugas memutus perkara pelaku tindakan kriminal yang telah diterima dari Jaksa Penuntut Umum untuk di persidangkan. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman), Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan hakim dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan.

Tugas Hakim tidak hanya berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara pidana, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Memang pada hakekatnya dari seorang Hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu Hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang di ajukan kepada pengadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Undang-undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.



Kembali kepada permasalahan mengenai kejahatan anasusila, salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Masalah persetubuhan sendiri tidak lepas dari adanya korban dan pelaku kejahatan itu sendiri, diperlukan adanya pendekatan-pendekatan tertentu untuk memahami pelaku dan korban. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat bahwa lingkungan di sekitar kita yang seharusnya tempat yang paling aman ternyata tak seaman yang dipikirkan baik untuk orang yang telah dewasa bahkan lebih berbahaya lagi bagi anak-anak. Anak sering sekali menjadi korban kejahatan, salah satunya sebagai korban pemerkosaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah berupaya mengatasi atau menekan terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umur dengan memberlakukan Perundang-undangan dan atau berbagai ketentuan hukum yang memuat sanksi hukuman bagi pelaku.

Tindak pidana persetubuhan anak akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, di wilayah hukum Kota Madiun Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kota Madiun.

Salah satu kasus yang menarik terkait dengan perkara tindak pidana persetubuhan anak yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Madiun dengan Nomor : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN atas nama terdakwa Iqbal Riza bin Didik Kusdiyono umur 17

tahun dinyatakan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan nama korban Wulandari dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk.<sup>3</sup> Dalam putusan tersebut dapat dikatakan menarik karena antara pelaku dengan korban merupakan anak, selanjutnya yang menarik ialah putusan hakim yang menjatuhkan tindakan yang berpadai kembali kepada orang tua.

<sup>3</sup> Dikutip dari Putusan Perkara Anak No : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN. Pengadilan Negeri Madiun.



Melihat kasus dalam putusan tersebut, maka hal-hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah terkait dengan putusan hakim yang berupa tindakan terhadap terdakwa yang masih di kategorikan sebagai anak yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak pula. Jika diperhatikan, dampak dari tindak pidana pencabulan tersebut sangatlah menyakitkan dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi mereka yang menjadi korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis mengambil judul : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN.)**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur pada putusan No. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN?
2. Apakah Putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN telah sesuai dengan ketentuan tentang batas umur dan penentuan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997?



## C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian tentu mempunyai tujuan jelas dan pasti, tentang apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian sedikit banyaknya akan menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur pada putusan No. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kesesuaian Putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN dengan ketentuan tentang batas umur dan penjatuhan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat.

### 1. Teoritis

Secara teoritis penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang mengenai masalah yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap pelaku pada perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di lingkungan sekitar.

### 2. Praktis



Secarapraktismanfaatpenulisaninimeliputi :

1. Bagimasyarakat

Sebagaisaranamemperolehwasandanpenjelasanataspertimbangan Hakim terhadappelakupadaperkaratindakpidanapersetubuhananak di bawahumur.

2. Bagikalanganakademis

Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikantambahanpengetahuanmengena ipertimbangan hakim terhadappelakupadaperkaratindakpidanapersetubuhananak di bawahumur yang terjadi di lingkungansekitarsehinggadiperolehsuatuhasildalamsebuahlaporan yang jelas, sistematisdanmudahdipahamibagisemua.

3. BagiAparatPenegakHukum

Penelitianinidiharapkandapatmemberikanmasukankepadapihak aparatpenegak hukumuntukmempertimbangkansuspersetubuhananak di bawahumur.

## E. SITEMATIKA PENULISAN

Untukmempermudahmemperolehgambaranmengenaiaisiskripsi yang akanditulis, makapenulismembagisecarasistematisdalam lima babdenganperincian :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam babini, penulis akan menguraikan secara keseluruhan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah yang akan di angkat, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA



Dalam bab ini disajikan teori-teori yang mempunyai kaitan dengan penulisan proposal penelitian yang selanjutnya diungkapkan pula studi pustaka untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini. Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan umum mengenai dasar pertimbangan hakim, tinjauan mengenai putusan, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan mengenai tindak pidana persetubuhan, dan tinjauan umum mengenai anak.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan, teknik analisa bahan hukum serta definisi konseptual.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan inti dari penelitian ini yakni mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang menjadi permasalahan terkait dengan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak khususnyapadaputusanNo. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim

##### 1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hukum

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata yakni dasar dan timbang, kata "dasar" dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal.<sup>1</sup> Kata "timbang" berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).

Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan dasar pertimbangan secara subyektif. Yang dimaksud dasar pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara obyektif titik beratnya pada cara pelaku tindak pidana melakukan pidana. Sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah keterkaitan dengan kondisi pelaku bahwa pelaku melakukan tersebut dengan adanya niat terhadap saksi korban yang dilaksanakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim, misalnya hal-hal yang meringankan terdakwa adalah

1. Pelaku belum pernah dihukum.
2. Pelaku masih muda dan masih bisa memperbaiki diri.
3. Pelaku memberikan keterangan yang sebenarnya.
4. Pelaku menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi.

Sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah :

1. Menghancurkan masa depan korban

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 238.



2. Meresahkan masyarakat dan sulit diterima di depan masyarakat

3. Pelanggaran etika di dalam keagamaan

Dalam fungsinya perlindungan kepentingan manusia, hukum itu mempunyai tujuan.

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencari tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang segojanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakekat kaedah hukum merupakan pandangan tentang bagaimana seharusnya segojanya seseorang bertindak laku. Sebagai pedoman kaedah hukum bersifat umum dan pasif. Kaedah hukum berisi kenyataan normatif (apa yang segojanya dilakukan) *das sollen* dan bukan berisikan kenyataan alamiah peristiwa konkrit. *Das sein* "barang siapa yang melakukan kejahatan harus di hukum", dasar *das sollen* "Barang siapa yang membeli sesuatu harus membayar", suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata, melainkan apa yang seharusnya atau segojanya terjadi.

Dalam hukum yang terpenting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi, sebagai syarat harus terjadi peristiwa konkrit terlebih dahulu. Kaedah hukum bersifat memerintah, mengharuskan. Kaedah hukum itu bersifat memerintah, mengharuskan atau preskriptif. Telah dikemukakan bahwa kaedah hukum itu bersifat pasif. Rangsangan untuk mengaktifkan kaedah hukum adalah peristiwa konkrit (*das sein*), dengan terjadinya peristiwa konkrit tertentu kaedah hukum baru dapat aktif, karena lalu dapat diterapkan pada peristiwa konkrit tersebut.



Peristiwa konkrit merupakan aktivator yang diperlukan untuk dapat membuat aktif kaedah hukum. Karena kaedah hukumlah peristiwa konkrit itu menjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat atau hukum atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban. Suatu peristiwa konkrit tidak mungkin dengan sendirinya menjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak mungkin terjadi tanpa adanya kaedah hukum. Peristiwa hukum tidak dapat di konstatir tanpa menggunakan kaedah hukum. Peristiwa hukum itu diciptakan oleh kaedah hukum.

Sebaliknya peristiwa hukum itu dalam proses terjadinya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa konkrit. Kaedah hukum megkualifisir suatu aspek dari suatu peristiwa hukum. Suatu aspek dari kenyataan itu dapat berlaku sebagai peristiwa hukum, tergantung pada kaedah hukum yang bersangkutan. Peristiwa konkrit (*das sein*) untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan *das sollen*. Kalau di atas dikatakan bahwa *Sollen* memerlukan *Sein*, maka disini *Sein* memerlukan *Sollen*, jadi saling ada hubungannya antara *Sein-Sollen dan Sollen- Sein*.<sup>2</sup>

Dalam melakukan pertimbangan mencakup tiga teoridalamtujuanhukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

#### 1. Keadilan (*Gerectigheit*)

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan adil.

Sementara adil tidak berat sebelah tidak memihak dan hanya berpihak kepada yang benar. Keadilan dalam kajian filsafat adalah dipenuhi dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia hanya apa yang

<sup>2</sup> Rudi Surdirdja, *RangkumanBukuMengenalHukum* Karangan Prof.. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., 2010, E-Book(online), <http://rudipradisetia.com/2010/09/rangku-man-buku-mengenal-hukum-karangan.html>. (3 Oktober 2013).



menjadi haknya. Keadilan itu lahir dari hukum positif yang ditetapkan manusia, konsep keadilan itu mencakup pengertian yang jernih dan bebas nilai.<sup>3</sup>

### 2. Kepastian (*Rechtmatigheid*)

Kepastian yaitu asas yang dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

### 3. Kemanfaatan (*Zwechmatigheid* atau *Doelmatigheid*).

Kemanfaatan yaitu asas yang untuk mengamanatkan yaitu dengan adanya Undang-undang khusus Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

## b. Pengertian, Tugas, dan Kewenangan Hakim.

### 1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional Kode etik hakim disebut juga kode kehormatan Hakim. Selain itu, Hakim juga merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh Undang-undang.

Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Sedangkan menurut pasal 19 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim

<sup>3</sup>Muntasir Syukri, 2012, *Keadilan Dalam Sorotan* (online), Artikel. Bangil, jurnaldikutip dari penulis teori Hans Kelsen, <http://badilag.net/data/Artikel/20Keadilan/20Dalam/20sorotan.pdf> (3 Oktober 2013).





adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

## 2. Tugas dan Wewenang Hakim

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masyarakat pergaulan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggal dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim juga wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana. Sifat-sifat yang baik maupun buruk dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan keadaan-keadaan pribadi seorang perlu dipertimbangkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya.

Menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai mengadili perkara yang masuk di pengadilan. Tugas utama hakim adalah menerima dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.



Dalam perkara perdata,

hakim

harus membantuparapencarikedilandanberusahakerasmengatasihambatan-

hambatan dan rintangan agar terciptaperadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kedudukan

hakim

bebas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan peradilan. Pengawasan terhadap

hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung ( MA ) dan Komisi Yudisial ( KY ).

## B. Kajian Umum tentang Putusan Akhir

### 1. Pengertian Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan masak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.<sup>4</sup> Ada juga yang mengartikan Putusan ( *vonnis* ) sebagai *vonnisteta*. Rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari *vonnis* adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut dengan *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan antara keputusan seladan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan putusan pendahuluan atau keputusan persiapan serta keputusan *provisio nele* yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.<sup>5</sup>

### 1. Jenis Putusan Akhir Pidana

<sup>4</sup>Demikian di muat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 Halaman 221.

<sup>5</sup>Leden Marpaung, **Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 129-130



Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :<sup>6</sup>

a. Pidana nanaupaenjatuhapidanadan/atautatatertib;

Pidana nanaupaenjatuhapidana mengacupadaketentuan yang

disebutkandalam Pasal 10 KUHP adalah:

1. Pidana Pokok;

a) Pidana Mati;

b) Pidana Penjara;

c) Pidana Kurungan;

d) Pidana Denda.

2. Pidana Tambahan:

a) Pencabutan beberapa hak tertentu;

b) Perampasan barang tertentu;

c) Pengumuman keputusan hakim.

b. Putusan bebas;

Putusan bebas dirumuskan Pasal 191 ayat 1 KUHP yang

bunyi yasebagai tersebut :

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus kan bebas”.

Dengan perkataan lain, baik kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

didakwakan tidak terbukti berdasarkan alat buktis ah yang ditentukan Pasal 184

KUHP pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

c. Putusan lepas dari se galatuntutan hukum.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 285.



Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini di dalam Pasal 191 ayat (2)

KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

## C. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Anak

### 1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak merupakan pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Menurut *The Minimum Age Convention* nomor 138 tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention On The Rights of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.

Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.<sup>7</sup>

### 2. Pengertian Tindak Pidana Anak

<sup>7</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm 19.



Tindak pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan istilah yang berbeda yakni istilah *delinkuen* yang berasal dari istilah *delinquency* yang artinya adalah kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikueansi. Kata *delikueansi* atau *delinquency* dijumpai bergandeng dengan kata *juvenile*, dikarena *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquen act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan anak-anak, maka disebut *delinquency*.<sup>8</sup>

### 3. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana oleh anak hal ini menunjukkan sebuah perbedaan dengan pertanggungjawaban pidana biasa. Merujuk pada ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak) menyatakan bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidangan anak yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

### 4. Sanksi terhadap Tindak Pidana Anak

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak khususnya pada pasal 25 ditentukan berdasarkan perbedaan umur dan anak, yaitu bagianak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dapat dikenakan tindakan atau dapat pula dikenakan pidana.

### 5. Hak - hak Terhadap Anak

<sup>8</sup>Marlina, *Op.cit*, hlm 37



Mengenai hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak.

Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak, baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

- a. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- c. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan
- d. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial
- e. Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial, mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- f. Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang anak memerlukan kasih sayang dan pengertian
- g. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
- h. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama



i. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.

j. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.<sup>9</sup>

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yang di adopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang :

1. Hak atas kelangsungan hidup : menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan
2. Hak untuk berkembang : mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan : mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat berkumpul dan berserikat, serta untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Abu Huraerah, *Op Cit*, hlm 20.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 21-22.



#### D. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan

##### 1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana

Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini dalam WvS Belanda, dengan

demikian juga WvS Hindia Belanda Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*

itu.<sup>11</sup>

Menurut Simons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat di pertanggungjawabkan tindakannya oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat di hukum.<sup>12</sup>

Pengertian sederhana tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

Dua unsur tindak pidana yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif antara lain perbuatan orang, akibat kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sifat "openbaar" atau "dimuka umum". Sedangkan unsur subyektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus

<sup>11</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 hlm 67.

<sup>12</sup> Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik), Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 23.

<sup>13</sup> Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami HUKUM PIDANA (Jilid 1), Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011 hlm, 39.



dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.<sup>14</sup>

## **2. Pengertian Persetubuhan.**

Persetubuhan atau hubungan seksual adalah tindakanyang dilakukan oleh manusia yaitu merujuk pada pertemuan antaratelakelaminlelaki dan perempuan dan mengeluarkan sperma. Persetubuhan mungkin didahului dengan percumbuan, yang menyebabkan gairah pada pasangan, menyebabkan penis mengalami ereksi dan pelumasan alami pada vagina. Persetubuhan atau perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa di bawah umur 16 tahun, apabila orang belum dewasa di bawah umur itu telah berkenalan dengan perbuatan seksual dan persetubuhan, orang takut akan ditimbulkan berbagai bahaya. Bagi anak perempuan, bahayanya ialah bahwa ia akan menjadi ibu tanpa kawin dengan usia yang masih terlalu muda atau terpaksa kawin dengan usia yang masih terlalu muda atau terpaksa kawin tanpa pertimbangan yang sehat.<sup>15</sup>

## **3. Macam-macam Tindak Pidana Persetubuhan.**

Adapun isi dari pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan sebagai berikut:

### **a. Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :**

Persetubuhan diluar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

### **b. Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :**

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 45.

<sup>15</sup>Leden Marpaung, *Op Cit*, hlm. 59



Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 291 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan :

- 1) Persetubuhan yang mengakibatkan wanitanya luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- 2) Persetubuhan mengakibatkan wanitanya mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Selanjutnya khusus terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak) Pasal 81 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

1. "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".<sup>16</sup>
2. "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Selain itu, orang yang melakukan persetubuhan dengan anak dapat juga dijerat dengan Pasal 82 UU Perlindungan Anak juga menyatakan :

"Setiap orang yang sedang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

<sup>16</sup>Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bandung, Fokus Mandiri, 2012, hlm 35.



Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*Lex specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya UU Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 UU Perlindungan Anak merupakan "*Lex specialis derogat lex generalis*" dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.<sup>17</sup>

#### E. Kajian Umum tentang Restorative Justice

Jeff Christian berpendapat bahwa *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat-istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.<sup>18</sup>

Pengertian *restorative*

*justice*

atau keadilan restoratif tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-

<sup>17</sup>

Wira Pratiwi, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makasar, 2012, hlm 5.

<sup>18</sup>

David Setiawan, Menuju Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak, <http://www.kpai.go.id/artikel/menuju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak/>, (Online) diakses 27 Februari 2014.

A.



undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA)<sup>19</sup>, yang menyatakan :

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadaan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban nyasendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Dalam hal ini diperlukan memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum yang terdapat pada UU SPPA ini tidak akan dibahas secara utuh dengan kaitannya dalam permasalahan penelitian ini. Hal ini didasarkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor: 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN tetap menggunakan dasar hukum yang lama yakni UU Pengadilan Anak. Walaupun UU SPPA diundangkan pada kurun waktu tahun 2012 dan putusan pengadilan tersebut diputuskan pada tahun 2013, tidak secara langsung dasar hukum yang digunakan adalah UU SPPA, karena berdasarkan aturan peralihan UU SPPA menyatakan bahwa pemberlakuan UU SPPA berlaku setelah 2 tahun diundangkan. Dengan demikian, ketentuan dasar hukum tetap memakai UU Pengadilan Anak.

<sup>20</sup> Jacky Tengens, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jacky-tengens--sh->, (Online) diakses 27 Februari 2014.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian

yang

digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Peneliti melakukan dengan mengkaji sist

ematik hukum mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subje

khukum, hak, dan kewajiban peristiwa hukum dalam peraturan perundang-

undang tentang anak.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan

yang

digunakan dalam penelitian ini adalah *statute*

*approach*

(pendekatan perundang-undangan).

Dalam penelitian ini akan menganalisis terkait dengan putusan Pengadilan Negeri

Kota

Madiun Nomor:

38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN

yang

selanjutnya akan dikaitkan dengan peraturan perundangan-undangan yang terkait, seperti

UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak.

##### C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer

yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari

perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim.<sup>1</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

<sup>1</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media Publishing, Malang, 2007, hlm 141.



2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Putusan Pengadilan negeri Madiun dengan Nomor 258/Pid.Sus/2012/PN.KD.MN.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri atas penjelasan undang-undang, literatur-literatur, makalah-makalah dalam seminar, jurnal, artikel-artikel dan berbagai tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum. Ensiklopedia yang dapat memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

#### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan



penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, jurnal serta artikel-artikel yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun untuk memperoleh bahan hukum melakukan studi kepustakaan (*library research*) serta studi dokumen yang dilakukan peneliti di Pusat Dokumen dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang.

## E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis

data

padapenelitianini menggunakan metode analisis kualitatif dengan rincian sebagai berikut :

- a. Padatahapawalakandilakukanstudikepustakaan, yaitudengancaramencarisebagai peraturanperundang-undangandoktrin yang berhubungandenganfokuspermasalahan yang diteliti.
- b. Padatahapselanjutnyaatautahapterakhir yaitumenarikkesimpulanatasberbagai data yang diperoleh dengancara dianalisis dan ditafsirkan secara *Gramatical* (tata bahasa) dan sistematis. Soedikno Mertokusumo mengemukakan bahwa, “interpretasi gramatika merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya”.<sup>2</sup> Penafsiran secara sistematis yaitu apabila suatu istilah atau perkataan

<sup>2</sup>Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hal. 170.



taandicantumkan dua kali dalam suatu pasal, ataupun pada undang-undang maka pengertiannya harus sama.<sup>3</sup>

## F. Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi penafsiran dalam penelitian ini diberikan Definisi Operasional yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Dasar pertimbangan :

Dalam melakukan upaya memutus, seorang Hakim menggunakan dasar pertimbangan untuk memutus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata yakni dasar dan timbang, kata "dasar" dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata "timbang" berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).

### 2. Tindak Pidana Persetubuhan :

Tindakan yang dilakukan oleh manusia yaitu merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan dan mengeluarkan sperma.

### 3. Anak :

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa yang dilahirkan oleh wanita meskipun melakukan pernikahan tetapi dikatakan anak.

<sup>3</sup>Shaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 225



**BAB IV****HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN**

Dalam bagian pembahasan ini akan diawali dengan mengurai substansi dalam putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN. Berikut uraiannya:

**1. Uraian Putusan****a) Identitas terdakwa**

Nama lengkap : IQBAL RIZA bin DIDIK KUSDIYONO  
Tempat lahir : Madiun  
Umur/tgl.lahir : 17 tahun/ 14 april 1995  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

**b) Posisi Kasus**

Duduk perkara sebagaimana dapat dijelaskan berdasarkan dari kutipan surat dakwaan penuntut umum yang ada dalam putusan sebagai berikut:<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Putusan Perkara Anak No : 38/PID.SUS/2013.KN.MD.MN. Pengadilan Negeri Madiun



1) Bahwa antara terdakwa Iqbal Riza bin Didik Kusdiyono saksi korban Wulandari sejak tanggal 27 Desember 2010 ada hubungan pacaran, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Maret 2012 bertempat didalam kamar rumah terdakwa Iqbal Riza bin Didik Kusdiyono yang terletak di jalan Albatros E 18 Perum Bumi Antariksa Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun saksi korban Wulandari datang kerumah terdakwa tersebut dimana pada saat itu keadaan sepi dan terdakwa sedang tiduran di kamar ibunya.

2) Kemudian saksi korban menghampiri terdakwa di kamar ibu dan terdakwa kemudian antara terdakwa dan saksi korban Wulandari saling berciuman, kemudian terdakwa meraba payudara saksi korban wulandari kemudian antara terdakwa dan saksi korban membuka pakaian masing-masing, kemudian terdakwa menindih saksi korban Wulandari dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam vagina saksi korban Wulandari hingga mengeluarkan sperma kedalam vagina saksi korban Wulandari.

3) Hal tersebut kemudian berlanjut seminggu kemudian ditempat yang sama, dan juga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada saat liburan UTS semester 2 tahun 2011, bertempat di sebuah penginapan di daerah Telaga Sarangan Kabupaten Magetan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan 2012 bertempat di rumah saksi Romadhon Putra Surya



Prawira yang terletak di Jalan Raya Nglames No.107 Desa Tiron RT/RW. 02/02 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada antara bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2012 di kamar Kos saksi Wulandari di Jalan Ciliwung, Kecamatan Taman Kota Madiun, serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2012 terakhir pada tanggal 13 Desember 2012 di kamar kos saksi korban Wulandari yang terletak pada di Jalan Kalasan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

**c) Dakwaan Penuntut Umum**

Surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa merupakan dakwaan alternatif, yakni sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama:

Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

- Dakwaan Kedua:

Pasal 82 UU Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

**d) Tuntutan Pidana Penuntut Umum**

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara: 2 (dua) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair: 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penahanan.

**e) Putusan Hakim**



1. Menyatakan terdakwa IQBAL RIZA bin DIDIK

KUSDIYON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana **“MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN**

**PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA**

**BERLANJUT”**;

2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa IQBAL RIZA bin DIDIK

KUSDIYON dikembalikan kepada orangtuanya;

3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kota Madiun supaya terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara

segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Menyatakan barang bukti :

- 1 ( satu ) buah hem warna kuning
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru
- 1 (satu) buah bra warna ungu
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada saksi Wulandari

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

### a) Pertimbangan Hakim terhadap Fakta Hukum

- Bahwa awalnya saksi Wulandari bersama-sama temannya jalan-jalan ke

Caruban, di tengah perjalanan bertemu dan berkenalan dengan terdakwa

Iqbal Riza;



- Bahwa kemudian saksi Wulandari dan terdakwa Iqbal Riza melanjutkan pertemanannya melalui facebook, yang kemudian saling bertukar nomor telepon HP masing-masing;

Bahwa selanjutnya saksi Wulandari dan terdakwa Iqbal Riza saling jatuh cinta dan berpacaran sejak tanggal 27 Desember 2010;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2011 saksi korban Wulandari datang ke rumah terdakwa di Jalan Albatros E 18 Perumahan Bumi Antariksa Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada saat itu rumah terdakwa dalam keadaan kosong;

- Bahwa pada waktu saksi Wulandari duduk di ruang tamu, terdakwa tiduran di kamar ibunya, lalu terdakwa memanggil saksi Wulandari dan masuk ke kamar tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi Wulandari saling berciuman, terdakwa meraba payudara saksi Wulandari, lalu terdakwa dan saksi Wulandari menanggalkan pakaian masing-masing sehingga mereka berdua telanjang bulat;

- Bahwa setelah pakaian mereka ditanggalkan, kemudian terdakwa menindih saksi Wulandari yang posisinya telentang, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Wulandari, terdakwa menarik dan memasukkan kemaluannya berulang kali sampai dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Wulandari;



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diulangi selang 2 (dua) minggu kemudian di rumah terdakwa, kemudian diulangi lagi di Hotel Melati

Telaga Sarangan – Magetan, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni sampai dengan bulan Oktober

2012 di kamar Kos saksi Wulandari di Jalan Ciliwung, Kota Madiun, dan terakhir pada tanggal 13 Desember 2012 di kamar kos saksi korban Wulandari di Jalan Kalasan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa saksi Wulandari mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena saksi Wulandari mencintai terdakwa dan pada saat pertama melakukan persetubuhan terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab jika saksi Wulandari menjadi hamil;

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2012 saksi Wulandari tidak datang haid (menstruasi), lalu pada bulan Juni 2012 saksi korban Wulandari membeli tes peck untuk mengecek kehamilan ternyata saksi Wulandari positif hamil;

- Bahwa selanjutnya saksi Wulandari menceritakan kehamilannya kepada terdakwa, saksi korban minta pertanggungjawaban terdakwa untuk menikahinya secara sah, tetapi terdakwa bingung dan tidak dapat mengambil keputusan;

- Bahwa terdakwa terakhir melakukan persetubuhan dengan saksi Wulandari pada tanggal 23 Desember 2013 di rumah kost-nya di Jalan Kalasan Kota Madiun;



- Bahwa kemudian pada akhir bulan Desember 2012 keluarga saksi korban Wulandari mendatangi rumah orangtua terdakwa untuk minta pertanggung jawaban terdakwa supaya menikahi saksi Wulandari, keluarga terdakwa menyatakan bersedia bertanggungjawab menikahkan terdakwa dengan saksi korban Wulandari secara sirri dan akan mengadopsi anak yang sedang dikandung saksi korban WULANDARI, akan tetapi keluarga saksi Wulandari tidak mau, kemudian saksi Wulandari melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses menurut hukum;

- Bahwa terdakwa lahir di Kota Madiun pada tanggal 14 April 1995, sedangkan saksi Wulandari lahir di Madiun pada tanggal 18 Nopember 1994;

- Bahwa pada saat pertama terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Wulandari, saksi Wulandari menanyakan kepada terdakwa bagaimana jika ia hamil, terdakwa menjawab akan bertanggung jawab akan menikahi saksi Wulandari, dan juga pada saat saksi Wulandari menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia telah hamil, terdakwa menjawab supaya (anak dalam kandungan) dipelihara saja;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban Wulandari, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor:

R/105/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUKAMTO IRAWAN, dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Kota Madiun, hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan :



a) Pemeriksaan umum :

- Kepala dan leher:

Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Dada dan punggung:

Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Anggota gerak atas:

Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Anggota gerak bawah:

Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

b) Pemeriksaan khusus :

- Colok dubur:

Renggang otot polos lingkaran dubur normal dan selaput lender  
poros usus normal.

c) Pemeriksaan Dalam:

- Luka robek lama di selaput darah jam 3 dan 11 tidak sampai dasar.
- Luka robek lama di selaput dara arah jam 5 dan 7 sampai dasar.

d) Pemeriksaan tambahan :

- Flour albus (+) Negatif.
- Tes kehamilan (+) positif dan mammae kanan dan kiri sudah keluar  
colostrum.
- Tinggi Fundus Uteri=26 cm dan detak jantung janin=154/m.
- Posisi janin punggung kanan dan kepala janin belum masuk pintu  
atas panggul.



**Kesimpulan:**

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul ;

- Bahwa saat ini saksi Wulandari tersebut telah melahirkan anaknya di Rumah Sakit Darmayu Ponorogo pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 jenis kelamin perempuan dan diberi nama Zahira Fathiha Shauqqiy;

**b) Pertimbangan Hakim terhadap Unsur-Unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum**

Dalam hal ini hakim akan mempertimbangkan terkait dengan dakwaan pertama yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah:

**1. Setiap orang**

- Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang bernama Iqbal Riza Bin Didik Kusdiyono yang identitas selengkapnya seperti diuraikan dalam surat dakwaan di atas, terhadap identitas mana terdakwa membenarkannya, di samping itu dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan dibenarkan terdakwa bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa Iqbal Riza Bin Didik Kusdiyono tersebut;

**2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa dalam melakukan



perbuatannya dilakukan dengan sengaja membujuk terhadap seorang anak, dengan demikian telah memenuhi unsur yaitu **“dengan sengaja membujuk anak”**

### **3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

- Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi Wulandari mengakibatkan saksi Wulandari hamil sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor:

R/105/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sukanto Irawan, dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Kota Madiun;

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur **“melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi sah menurut hukum

### **4. Yang dilakukan secara berlanjut**

- Menimbang, bahwa dari pengertian di atas apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tersebut, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta yang diuraikan di atas diketahui bahwa benar terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi Wulandari pertama pada bulan Maret 2012 di rumah orangtuanya di Jalan Albatros E 18 Perumahan Bumi Antariksa Kota Madiun, perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dan terakhir dilakukan pada tanggal 23 Desember 2012 di rumah kos saksi Wulandari di Jalan Kalasan Patihan Kota Madiun.

### **c) Pertimbangan Hakim Secara Umum**



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut.

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban putus sekolah.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan karena kerugian yang dialami oleh korban berdampak serius pada kelangsungan masa depan korban. Dengan demikian patut diberikan suatu sanksi yang setidaknya membuat terdakwa sadar bahwa perbuatannya telah merugikan korban.

- Saksi korban mengandung dan telah melahirkan anak perempuan.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan karena akibat perbuatan terdakwa yang menimbulkan korban menjadi hamil dan telah melahirkan anak secara langsung memberikan dampak negatif pada korban. Maksud dari dampak negatif ini adalah pandangan masyarakat umum yang menilai korban bukan sebagai wanita yang terhormat karena korban hamil dan melahirkan seorang anak tanpa kehadiran suami atau ayah. Hal ini menjadikan sanksi social ditanggung oleh korban.

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena seseorang ketika belum pernah menjalani perbuatan pidana dan pada





akhirnya dia melakukan perbuatan pidana maka dapat dikatakan

bahwa sifat buruk atau jahat pada pelaku masih dapat diperbaiki

sehingga masih ada kesempatan untuk pelaku memperbaiki perilaku

atau tindakannya.

- Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan sedang mengikuti persiapan ujian akhir sekolah.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena pada

intinya terdakwa masih memiliki harapan kedepan untuk mendapatkan

masa depan yang cerah mengingat status terdakwa sebagai pelajar.

Dengan demikian masih diberikan waktu dan kesempatan untuk

mencapai masa depan yang baik agar kelak berguna bagi nusa dan

bangsa.

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena

pengakuan terdakwa menunjukkan sebagai rasa penyesalan yang

terdalam akibat dari perbuatannya. Sehingga rasa penyesalan tersebut

dijadikan sebagai tolak ukur bahwa terdakwa akan bertanggungjawab

atas perbuatannya.

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena

merupakan rasa dan bentuk tanggung jawab terdakwa terhadap korban.



- Terdakwa dengan kesadaran sendiri masih mencintai dan menyayangi saksi korban dan akan menikahi secara sah saksi korban.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena menunjukkan sebuah ketulusan akan cinta terdakwa terhadap korban diikuti dengan bentuk pertanggungjawabannya akibat perbuatannya yaitu dengan menikahi korban.

Berdasarkan penjelasan mengenai uraian Putusan Nomor.38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN maka terdapat beberapa hal yang dapat di analisa. Berikut penjelasannya :

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan dalam perkara putusan Nomor.38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN merupakan dakwaan alternatif. Menurut Van Bemmelen dakwaan alternatif sesungguhnya masing-masing dakwaan bersifat saling mengecualikan satu sama lain. Dengan demikian hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.<sup>2</sup>

Hal ini berarti bahwa sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, dimana hakim hanya mempertimbangkan satu dakwaan yakni dakwaan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hal ini didasari karena hakim bebas untuk memilih dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Loc.cit*, hlm 185.



b. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan tuntutan penuntut umum maka terdakwa dituntut dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair; 3 (tiga) bulan kurungan. Akan tetapi putusan hakim berseberangan dengan tuntutan penuntut umum. Hal ini dapat dipandang bahwa paradigma penuntut umum dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yakni teori absolut.

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.<sup>3</sup> Jika merunut posisi kasus yang terjadi seharusnya penuntut umum tidak memberikan tuntutan pidana penjara. Walaupun berdasarkan UU Pengadilan Anak memberikan dua alternatif sanksi kepada anak yang kategori perbuatannya terklasifikasi sebagai tindak pidana.

Adapun bila penuntut umum berangkat dari ketentuan pidana yang ada dalam UU Perlindungan Anak seharusnya penuntut umum mengetahui bahwa terdakwa masih dikategorikan sebagai anak.

c. Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Penuntut Umum

Memang pada dasarnya pertimbangan hakim telah diuraikan dalam bagian pertimbangan hukum yang terdapat dalam substansi putusan. Akan tetapi disini akan tetap dianalisis seluruh dasar pertimbangan hukum oleh

<sup>3</sup> Herbert L. Packer, *The Limit Of Criminal Sanction*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 187.



hakim yang menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti jika disandarkan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan. Dengan demikian analisis ini akan menitikberatkan terhadap garis besar yang menyatakan seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terbukti.

Terkait dengan pertimbangan hakim terhadap dakwaan penuntut umum ini sebenarnya akan mengarah langsung dari unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa. Perlu diketahui lagi sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa dakwaan yang digunakan penuntut umum adalah dakwaan alternatif, sehingga dari dua dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum oleh hakim akan dipilih secara bebas, satu dakwaan yang hendak dibuktikannya. Dalam hal ini yaitu dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berikut uraian unsur-unsur yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum persidangan:

1. Setiap orang

Unsur setiap orang didalam pasal 81 ayat 1 UU Perlindungan Anak pengertiannya dapat diketahui dengan melihat dari pasal 1 angka 16 menunjukkan bahwa pengertian seseorang dapat berarti dua subyek hukum yakni perseorangan atau korporasi. Dengan mengkaji fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka dapat dipahami bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum menunjuk kepada subjek hukum terdakwa. Secara jelas dengan mengurutkan fakta-



fakta hukum yang terjadi menunjukkan bahwa terdakwa adalah subyek hukum perseorangan. Dengan demikian sesuai dengan pertimbangan hakim terkait unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Dalam unsur kedua ini dapat diketahui selain unsur kesengajaan terdapat alternatif pilhan unsur objektif yang berupa perbuatan. Alternatif pilihan perbuatan yang disebutkan dalam pasal tersebut meliputi perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan perbuatan membujuk yang objek perbuatannya ditujukan kepada anak.

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui terdapat tiga unsur utama yang harus terpenuhi. Pertama terkait dengan unsur kesengajaan, mengkaji dari unsur kesengajaan dalam unsur pidana maka istilah ini sering disebut *opzet* atau *dolus*. Dalam unsur kesengajaan bila dilihat dari doktrin hukum pidana maka terdapat tiga macam kesengajaan. Pertama, kesengajaan yang bersifat untuk mencapai tujuan sesuatu (*opzet als oogmerk*). Kedua, kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai kesadaran, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau sering disebut dengan kesengajaan sadar akan kepastian. Ketiga kesengajaan yang disertai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*).<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, 1986, hlm 61



Jika melihat fakta-fakta hukum terkait dalam uraian putusan diatas maka dapat dikatakan unsur kesengajaan yang sesuai dengan fakta hukum adalah unsur kesengajaan yang berjenis sengaja dengan maksud. Hal ini didasari dengan rangkain pasal yang ada dalam dakwaan yang hanya menyebutkan tiga perbuatan yakni melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan dan membujuk. Dengan demikian memang terdakwa memiliki kehendak untuk melakukan salah satu dari tiga perbuatan tersebut. Salah satu dari tiga perbuatan tersebut yang sesuai dengan unsur dalam pasal yang didakwakan adalah unsur perbuatan membujuk. Alasannya adalah dengan meninjau fakta hukum yang menyatakan Bahwa saksi Wulandari mau melakukan persetubungan dengan terdakwa karena saksi Wulandari mencintai terdakwa dan pada saat pertama melakukan persetubuhan terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab jika saksi Wulandari menjadi hamil. Dari fakta hukum tersebut yang menjadi tolak ukur untuk menggambarkan perbuatan membujuk adalah terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan memberikan pengaruh bahwa jika terjadi dalam hal ini terjadi kehamilan maka terdakwa akan bertanggung jawab. Dengan demikian dua unsur antara kesengajaan dengan unsur objek perbuatan yang berupa membujuk telah terpenuhi. Selanjutnya unsur anak yang menjadi objek perbuatan, kembali lagi merujuk pada pengertian anak yang didefinisikan berdasarkan UU Perlindungan Anak. Dalam hal ini diatur dalam pasal 1 angka 1 yang menegaskan pada intinya anak adalah seseorang yang



belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Jika dikaji dari fakta hukum maka anak yang menjadi objek perbuatan tersebut adalah saksi korban Wulandari sebagaimana diketahui bahwa melihat dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum menunjukkan akta kelahiran dari saksi korban Wulandari. Berdasarkan dari akta kelahiran yang menjelaskan waku kelahiran saksi korban Wulandari 12 Juli 2010 lahir di Madiun pada tanggal 18 Nopember 1994 atau pada saat peristiwa tersebut, yaitu sebelum tanggal 18 Nopember 2012 masih belum genap berusia 18 tahun, maka dapat dipastikan bahwa saksi korban Wulandari tergolong sebagai subjek hukum anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dengan demikian keseluruhan unsur yang disebutkan dalam unsur-unsur kedua telah terpenuhi.

3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Terkait dalam unsur ini jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi maka unsur yang tepat adalah melakukan persetubuhan dengannya. Maksud dari “dengannya” adalah perbuatan untuk melakukan persetubuhan dilakukan oleh pelaku atau terdakwa sendiri. Hal ini didasari dengan fakta-fakta hukum yang menjelaskan bahwa saksi korban hanya melakukan persetubuhan terhadap satu orang yaitu terdakwa. Maka dari itu unsur terkait hal ini telah terpenuhi khususnya melakukan persetubuhan dengannya.

4. Yang dilakukan secara berlanjut



Unsur yang menjelaskan bahwa perbuatan dilakukan secara berlanjut sebenarnya dalam kajian ilmu hukum pidana merupakan gabungan tindak-tindak pidana (*samenloop van strafbare feiten*) atau *concursum*. Terkait dengan dakwaan Penuntut Umum yang secara langsung merujuk pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).<sup>5</sup>

Terkait dengan perbuatan berlanjut *Hoge Raad* Belanda telah menafsirkan terkait berlakunya syarat yang dicantumkan dalam pasal 64 ayat 1 KUHP syarat pertama yaitu harus ada satu penentuan kehendak dari pelaku yang meliputi perbuatan itu. Kedua perbuatan harus sejenis dan ketiga tenggang waktu antara perbuatan itu harus dekat.<sup>6</sup> Jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi maka dapat diketahui bahwa perbuatan pelaku (melakukan persetubuhan) terjadi lebih dari satu kali. Perbuatan pelaku jika dihitung telah terjadi lima kali. Perbuatan pertama dilakukan pada bulan Maret 2011, serta pada hari dan tanggal antara pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012, yang kedua pada saat liburan UTS semester 2 tahun 2011, yang ketiga tahun 2011 sampai dengan 2012 bertempat di rumah saksi Romadhon Putra Prawira yang terletak di Jalan Raya Nglames No.107 Desa Tiron Rt/RW. 02/02 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, yang keempat pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2012 dikamar kos saksi Wulandari dan yang kelima pada bulan Oktober 2012 terakhir pada tanggal 13 Desember

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 136

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 137



2012. Dengan demikian melihat fakta-fakta hukum menunjukkan bahwa syarat pertama terpenuhi karena semua perbuatan (persetubuhan) berawal dari dari kehendak pelaku atau terdakwa, syarat kedua adalah perbuatan yang dilakukan secara sejenis telah juga terpenuhi karena meninjau fakta-fakta hukum dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya persetubuhan (dilakukan sebanyak lima kali), dan syarat ketiga terkait jangka waktu yang pendek jika melihat runtutan waktu yang terjadi berdasarkan fakta-fakta hukum dapat dikatakan jangka waktu terdakwa untuk melakukan perbuatan itu sebagai jangka waktu yang pendek.

Dengan demikian seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 81 ayat

1 UU Perlindungan Anak dimana menjadi dakwaan Penuntut Umum memang telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar pasal 81 ayat 1 UU Perlindungan Anak.

d. Putusan Hakim Berupa Tindakan

Meninjau dari ulasan putusan Nomor. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN apabila dikaitkan dengan syarat pemidanaan dapat dikatakan syarat pemidanaan terpenuhi secara kumulatif. Maksud dari secara kumulatif ialah ketika suatu terdakwa dapat dijatuhi suatu pemidanaan maka antara perbuatan atau tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi. Terkait dengan putusan Nomor. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN dari aspek perbuatan atau tindak pidana telah diulas sebelumnya menunjukkan bahwa seluruh unsur perbuatan pidana oleh terdakwa telah terpenuhi baik unsure objektif



maupun unsure subjektif. Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam putusan Nomor. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN maka juga dapat dikatakan terpenuhi, walaupun sanksi yang diberikan bukan berupa sanksi pemidanaan melainkan penjatuan tindakan. Berdasarkan UU Pengadilan Anak memang pada dasarnya tindakan merupakan suatu perbedaan sanksi dari pada sanksi pidana pada umumnya. Tindakan dapat dikatakan sebagai sanksi yang bersifat lunak. Tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pelaku.<sup>7</sup>

Pada dasarnya tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Hal ini semata-mata ditujukan pada prefensi khusus yakni melindungi masyarakat dan ancaman yang dapat merugikan kepentingannya. Sekilas jika dikaji antara sanksi tindakan dalam putusan Nomor. 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif atau *restorative justice*. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm 202



menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.<sup>8</sup>

Meninjau dari pertimbangan hakim secara umum maka hal ini dapat dilihat ketika hakim memberikan putusan tindakan terhadap terdakwa yang didasarkan dengan pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang patut untuk tidak diselesaikan dengan penjatuan pidana penjara. Hal ini secara logis juga dapat diketahui proporsi antara hal yang memberatkan dengan hal yang meringankan. Secara umum jumlah proporsi hal yang meringankan lebih banyak dari pada hal yang memberatkan. Dengan demikian, Hakim disini bisa dilihat bahwa berpendapat putusan tindakan akan memberikan suatu upaya rehabilitatif tidak hanya terhadap pelaku akan tetapi juga korban. Korban disini kepentingannya menjadi terakomodasi sehingga pandangan bahwa pidana penjara untuk melakukan upaya pembalasan yang dilakukan terhadap terdakwa menjadi tidak berguna karena pada dasarnya pendekatan keadilan restoratif ini meminimalisir adanya upaya balas dendam sehingga putusan tindakan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan solusi terbaik bagi terdakwa maupun korban.

---

<sup>8</sup> Jecky Tengens, *Opcit*.



**B. Kesesuaian Putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997**

Sebelum mengkaji dan menjelaskan terkait kesesuaian putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN dengan UU Pengadilan Anak maka perlu di jelaskan kembali terkait penggunaan UU Pengadilan Anak sebagai instrument hukum beracara dalam putusan ini mengingat telah diundangkannya Undang-undang terbaru terkait pembaruan UU Pengadilan Anak. Yakni Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Hal ini didasari dengan meninjau ketentuan penutup pasal 108 UU SPPA menyatakan bahwa pada intinya UU SPPA dapat diberlakukan dengan jangka waktu 2 tahun dihitung sejak tanggal diundangkan. Meninjau uraian peristiwa pada putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN dapat diketahui bahwa waktu terjadinya tindak pidana dan pada saat proses penyidikan hingga proses persidangan menunjukkan bahwa masih terjadi dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013. Hal tersebut dapat dipahami dengan disandingkan apa yang dinyatakan pada ketentuan UU SPPA maka hal tersebut jelas instrument hukum acara yang digunakan tetap mengacu pada UU Pengadilan Anak. Pada ketentuan penutup menyatakan Undang-undang berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan, diketahui pula tanggal diundangkannya UU SPPA yakni pada 30 Juli 2012. Dengan demikian maka secara otomatis UU SPPA dapat diberlakukan pada tanggal 30 Juli 2014.

Kembali pada runtutan proses peradilan (tahap penyidikan sampai proses persidangan) terjadi sebelum tanggal 30 Juli 2014, maka secara kasat mata dasar hukum acara yang



digunakan dalam putusan menggunakan ketentuan yang ada dalam UU Pengadilan Anak.

Pada dasarnya Putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN menggunakan dasar hukum

baik materiil maupun formil secara berbeda. Berdasarkan sudut pandang hukum materiil yang

berarti mengatur terkait substansi materi perbuatan yang dilanggar putusan tersebut

menggunakan dasar hukum UU Perlindungan Anak *Junto* KUHP. Selanjutnya berdasarkan

sudut pandang hukum formil disini putusan tersebut menggunakan dasar hukum UU

Pengadilan Anak. Terkait dengan kesesuaian putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN

dengan UU Pengadilan Anak, akan lebih mudah dipahami dengan mengkaji pokok-pokok

aturan yang ada dalam UU Perlindungan Anak. Berikut pokok-pokok aturan UU Pelindungan

Anak dalam putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN:

#### 1. Persidangan Melalui Hakim Tunggal

Dalam putusan ini dapat dikatakan bahwa proses peradilan dalam putusan Nomor

38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN dipimpin oleh Hakim tunggal. Hal ini sebenarnya

dilaksanakan atas dasar amanat pasal 11 ayat 1 UU Pengadilan Anak. Akan tetapi asas

persidangan yang dipimpin oleh Hakim tunggal dalam proses persidangan anak bukanlah

suatu aturan yang mutlak, atau dapat dikatakan bersifat relatif. Hal ini didasari apabila

terjadi suatu alasan tertentu maka dapat dibentuk majelis hakim untuk memimpin proses

persidangan anak. Secara garis besar proses persidangan anak memang biasanya

dipimpin oleh hakim tunggal. Dengan demikian putusan Nomor

38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN yang dipimpin oleh hakim tunggal Supeno telah sesuai

dengan ketentuan dalam UU Pengadilan Anak.

#### 2. Kategori Terdakwa Sebagai Anak



Sejatinya batas usia anak untuk dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum masih menjadi perdebatan, hal ini didasari banyaknya aturan-aturan yang mengatur tentang anak dan memberikan batasan yang berbeda pula. Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, Akan tetapi dalam ranah hukum pidana yang secara langsung pasti akan berbicara suatu pertanggungjawaban pidana. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana seseorang telah diatur sedemikian rupa menurut undang-undang yang mengatur masing-masing. Akan tetapi, khusus berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana ada suatu pengaturan tersendiri yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak, yang diatur dalam UU Pengadilan Anak<sup>9</sup>.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak, definisi anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 (delapan belas) tahun. Dalam putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN dapat diketahui bahwa terdakwa apakah masih terbilang sebagai anak atau tidak dapat diketahui dengan usia pada saat terdakwa melakukan tindak pidana terkategori sebagai anak. Hal ini didasari bahwa dapat diketahui secara logika bahwa perbuatan pertama terdakwa melakukan masih berusia 16 (enam belas) tahun dan perbuatan terakhir dilakukan terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui perbuatan terdakwa masih dapat dipertanggungjawabkan secara pidana anak.

Jadi tolak ukur agar seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana anak adalah usia pelaku ketika melakukan tindak pidana masih belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU Pengadilan Anak.

<sup>9</sup>Wagiati Soetedjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 24.



### 3. Alternatif Sanksi Yang di Jatuhkan

Berlakunya UU Pengadilan Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak, Undang-undang ini berlaku khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Di dalam putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN disitu hakim menjatuhkan putusan berupa tindakan yang dikembalikan kepada orang tua.

Menurut UU Pengadilan Anak, anak nakal dapat dijatuhkan berupa pidana pokok, pidana tambahan ataupun pidana tindakan. Adapun macam-macam pidana sebagai berikut<sup>10</sup> :

a. Pidana pokok, adapun macam-macam pidana pokok adalah :

- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda
- Pidana pengawasan

b. Pidana Tambahan, seperti yang telah disebut bahwa selain ada pidana pokok maka terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan berupa pidana tambahan sebagai contoh perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi.

c. Tindakan, beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal menurut pasal 24 ayat 1 UU Pengadilan Anak antara lain mengembalikan kepada orang tua ataupun menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pembinaan.

Maksud dari alternatif sanksi yang dijatuhkan adalah adanya pilihan untuk memberikan sanksi antara sanksi pemidanaan atau sanksi tindakan. Berkaitan dengan putusan tindakan yang diberikan kepada terdakwa sebenarnya tidaklah menyalahi aturan karena memang sesuai dengan ketentuan pasal 25 UU Pengadilan Anak. Pada intinya pasal 25 menjelaskan bahwa anak nakal dibagi menjadi dua kategori, kategori pertama

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, 2008, hlm 27



adalah anak nakal yang melakukan tindak pidana dan kategori yang kedua adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pada kategori pertama berdasarkan UU Pengadilan Anak dapat diberikan sanksi pidana penjara ataupun sanksi tindakan (bersifat alternatif). Pada kategori kedua sanksi yang dapat diberikan hanya tindakan.

Terkait dengan putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN maka hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diurai dalam persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan kategori anak nakal yang pertama, hal ini didasari bahwa sejatinya perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana murni yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka sanksi yang akan dikenakan adalah sanksi pidana penjara. Akan tetapi, mengingat ketentuan dalam UU Pengadilan Anak yang memberikan pilihan alternatif sanksi antara sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan maka putusan mengenai sanksi tersebut menjadi pilihan yang bebas oleh hakim. Dengan demikian hal ini sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan Anak.

Dari ketiga pokok-pokok penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Pengadilan Anak. Akan tetapi, ada hal yang menarik dalam putusan tersebut, yakni terdapat suatu nilai keadilan restoratif atau *restorative justice*. Hal ini dikatakan menarik karena adanya hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan tindakan. Walaupun sebenarnya terkait dengan putusan tindakan bukan hal yang aneh berdasarkan UU Pengadilan Anak. Jadi hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dikatakan sebagai aspek penunjang manifestasi dari



keadilan restoratif. Hal-hal tersebut adalah pertimbangan hakim mengenai adanya suatu kesanggupan dari terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang secara langsung pertanggungjawaban oleh terdakwa tersebut memberikan suatu manfaat tidak hanya bagi pelaku, akan tetapi juga korban. Melihat ringkasan uraian yang menjelaskan bahwa terkait dengan saksi korban yang telah melahirkan hasil dari hubungan terdakwa memberikan suatu stigma bagi hakim untuk memberikan suatu solusi terkait dengan perkara ini.

Mengingat tujuan utama dari adanya keadilan restoratif menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Apabila mengkaji dari duduk perkara dalam putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN maka dapat dipahami bahwa hakim menciptakan suatu nilai keadilan restoratif dalam putusan tersebut. Hal ini mengingat aspek-aspek yang akan terjadi kedepan bahwa antar korban dan pelaku sebenarnya memiliki hubungan yang konflik hukum dalam hal ini perkara pidana dapat diselesaikan dengan tindakan-tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, sehingga dapat terjadi suatu hubungan simbiosis mutualisme yang memberikan suatu keuntungan bagi masing-masing pihak.

Dari keseluruhan mengenai penjelasan terkait kesesuaian putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN dengan UU Pengadilan Anak memang secara umum telah sesuai dan selain sesuai dengan UU Pengadilan Anak. Selain itu putusan tersebut juga



mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif yang dalam UU Pengadilan Anak tidak diatur mengenai hal tersebut.





**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

**1. Dasar pertimbangan**

dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana naper setubuh anak dibawah umur pada putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN adalah :

- Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Karena perbuatan terdakwa membuat saksi korban putus sekolah.
- 2) Saksi korban mengandung dan telah melahirkan anak perempuan.

- Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah di hukum.
- 2) Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan sedang mengikuti persiapan ujian akhir sekolah.
- 3) Terdakwa mengaku terusterang atas perbuatannya.
- 4) Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulang perbuatan melanggar hukum lagi.

**2. Dalam putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 UU tentang Pengadilan Anak tentang batasan umur dan ketentuan pasal 24 ayat 1 UU**

Pengadilan Anak tentang penjatuhansanksiberupatindakanbagianak



## B. SARAN

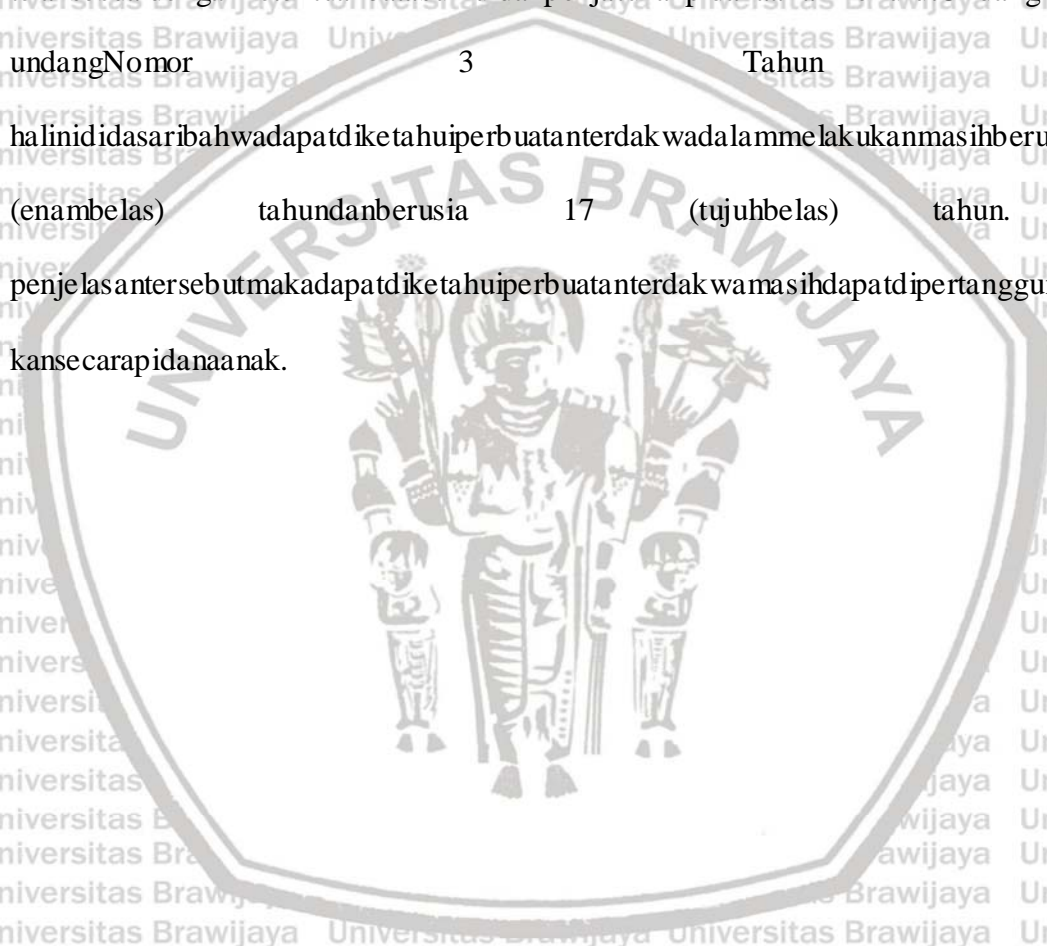
1. hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya harus memperhatikan dan mempertimbangkan putusan-putusannya apakah putusan tersebut sudah sangat adil baik bagi korban maupun bagi pelaku tersebut.

2. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN

telah sesuai dengan ketentuan batas umur dan penjatuh pidana anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997,

hal ini didasarkan bahwa dapat diketahui perbuatan terdakwa dalam melakukan masih berusia 16 (enam belas) tahun dan berusia 17 (tujuh belas) tahun. Dari

penjelasan tersebut maka dapat diketahui perbuatan terdakwa masih dapat dipertanggungjawabkan secara pidana anak.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Abu Huraerah, **Kekerasan Terhadap Anak**, Nuansa, Bandung, 2006

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, 2008.

Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, **Cepat dan Mudah Memahami HUKUM PIDANA (Jilid 1)**, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu media Publishing, Malang, 2007

Leden Marpaung, **Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Mahrus Ali, **Dasar-dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Shaq, **Dasar-dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Soedikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005

Wagiati Soetedjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Eresco, 1986

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

#### **PUTUSAN PENGADILAN:**

Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor : 38/PID.S US/2013.KN.MD.MN.

#### **JURNAL:**

A. Wira Pratiwi, **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persektubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makasar, 2012

#### **INTERNET:**

David Setiawan, **Menuju Restorative dalam Sistem Peradilan Anak**, <http://www.kpai.go.id/artikel/menuju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak/>, (Online) diakses 27 Februari 2014.

Jecky Tengens, **Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->, (Online) diakses 27 Februari 2014.

Muntasir Syukri, 2012, **Keadilan Dalam Sorotan** (online), Artikel. Bangil, jurnal dikutip dari penulisan teori Hans Kelsen, <http://badilag.net/data/ArtikeI/20Keadilan/20Dalam/20sorotan.pdf> (3 Oktober 2013).

Rudi Surdirdja, **Rangkuman Buku Mengenal Hukum Karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, 2010, E-Book (online), <http://rudipradisetia.com/2010/09/rangkuman-buku-mengenal-hukum-karangan.html>. (3 Oktober 2013).